

NASKAH PUBLIKASI

**GERAKAN PERLAWANAN MENOLAK PEMBANGUNAN
APARTEMEN (Stud Kasus di Dusun Balirejo, Kelurahan Muja Muju,
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta)**



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603163038

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403163025

GERAKAN PERLAWANAN MENOLAK PEMBANGUNAN APARTEMEN (Studi Kasus di Dusun Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta)

Fraisel Dwi Permana Titiahy

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fraiselfraisel21@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan pertumbuhan pembangunan ternyata harus sepadan dengan pertumbuhan masyarakat. Munculnya suatu tujuan dan kepentingan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka disitulah suatu perlawanan akan lahir. Suatu perlawanan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan karena ada ketidakadilan adalah gerakan sosial. Adanya rencana pembangunan Apartemen Puri Notoprojo oleh PT. Abudya Tata Anugrah Mandiri di Dusun Balirejo, Kelurahan Muja-Muju, Kota Yogyakarta, memunculkan perlawanan yang dilakukan oleh warga kampung Balirejo.

Penelitian ini dilakukan karena muncul aksi penolakan di Dusun Balirejo dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Ketua RW 05 Balirejo, Ketua RT 16, 17, 49, 52 Balirejo, Kepala Seksi Konsultasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Kepala Kelurahan Muja-Muju, dan Kepala Bidang Advokasi Walhi. Dan didukung dengan dokumentasi dari dokumen-dokumen seperti foto, video, dan surat-surat.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Untuk melihat suatu perlawanan adalah gerakan sosial maka menurut Sidney Tarrow ada empat konsep dasar: *Pertama*, Tantangan Kolektif. *Kedua*, Tujuan Bersama *Ketiga*, Solidaritas dan Identitas Kolektif. *Keempat*, Memelihara Politik Perlawanan. Tantangan kolektif bagi masyarakat balirejo adalah untuk menghadapi kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan anak cucu dimasa akan datang. Tujuan bersama masyarakat balirejo adalah keinginan untuk membatalkan rencana pembangunan apartemen Puri Notoprojo. Solidaritas dan identitas kolektif adalah kecintaan terhadap lingkungan. Memelihara politik perlawan adalah gerakan yang bersifat kerelawanan dan persaudaraan serta kepercayaan yang kuat dari setiap individu yang ikut berpartisipasi. Adapun alasan menolak pembangunan adalah warga tidak ingin dirugikan dari akses sosial individualisme, kesenjangan sosial, keamanan, kemudian akses fisik seperti kualitas air yang kurang, polusi udara, dan dari akses lalu lintas yaitu kemacetan. Beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan warga balirejo yaitu membuat petisi, membuat baliho, melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait, melakukan aksi pengembalian SK pengangkatan sebagai Ketua RW dan RT. Setelah berbagai upaya yang dilakukan warga balirejo untuk menolak memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif yaitu informasi satu arah yang hanya dapat diterima dari beberapa orang saja. Kemudian perubahan kondisi sosial dikarenakan ada kubu yang setuju dan tidak setuju. Dampak positif adalah gerakan yang dilakukan dapat dikatakan berhasil karena sampai saat ini lokasi pembangunan apartemen di segel dan berhenti proses pembangunan fisik.

Kata Kunci: *Gerakan Sosial, Gerakan Perlawanan, Pembangunan Apartemen*

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, ternyata memiliki pengaruh yang besar dalam merencanakan pembangunan. Jumlah penduduk yang tinggal dikota-kota besar semakin padat dan semakin membutuhkan banyak lahan untuk dijadikan tempat tinggal. Ketersediaan lahan yang kurang untuk dijadikan pemukiman membuat adanya pilihan lain dengan membangun perumahan menjulang keatas atau bertingkat, seperti apartemen atau rumah susun. Pembangunan rumah susun membutuhkan tanah jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan pembangunan rumah secara konvensional, sehingga ketersediaan lahan terbuka lebih luas di wilayah kota yang dapat digunakan untuk menata kembali daerah-daerah kumuh.

Di beberapa Kota besar yang ada diIndonesia sudah mulai kewalahan dalam mengurus masalah pembangunan hotel dan apartemen yang semakin meningkat. Salah satu daerah seperti Yogyakarta, berdasarkan data BPS Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2016, untuk Hotel Bintang dan memiliki sertifikat sebanyak 96 hotel. Sedangkan Jumlah Hotel Non Bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 sebanyak 589 Hotel. Secara perlahan jumlah ini akan terus bertambah dan semakin sulit untuk diawasi oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berbagai gerakan penolakan menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah dewasa. Kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengontrol kebijakan menjadikan tumbuhnya keinginan masyarakat melakukan aksi perlawanan karena banyak kekeliruan yang sering terjadi. Bukan hanya menolak tanpa tahu arah tapi masyarakat memiliki tujuan yang jauh lebih luas dalam menyikapi masalah kebijakan yang ada. Salah satu gerakan yang sampai saat ini masih terus diperjuangkan oleh masyarakat adalah yang terjadi di Dusun Balirejo, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Warga Dusun Balirejo, Kelurahan Muja Muju ini menolak keras pembangunan apartemen Puri Notoprojo, karena menurut warga pembangunan apartemen akan berdampak buruk bagi warga Dusun Balirejo. Mulai dari dampak lingkungan hingga dampak sosial(www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/03/opmd47291-warga-desak-pemkot-yogya-tindak-tegas-pembangunan-apartemen-ilegal).

Fenomena modernisasi sangat cepat dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta yang sedang gencar-gencarnya melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur.

Harapan dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, dengan adanya pembangunan akan memberikan imbas positif terhadap masyarakat sekitarnya. Tetapi penolakan yang dilakukan warga Dusun Balirejo merupakan pilihan yang berbeda. Gerakan sosial yang dibangun adalah atas kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian daerah dan warisan leluhur untuk masa depan. Belakangan ini yang banyak menjadi fokus adalah gerakan masyarakat bawah (*grassroot*). Melihat dari kasus dan masalah yang terjadi di Kota Yogyakarta, khususnya di Dusun Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, sebenarnya dapat dilihat dari akar permasalahannya yaitu perizinan. Bagaimana proses perizinan tersebut dapat memperlancar atau justru malah menghambat pembangunan.

Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika perlawanan masyarakat dalam Menolak Pembangunan Apartemen di Dusun Balirejo, Kota Yogyakarta.?

Kerangka Teori

Teori Gerakan Sosial

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori gerakan sosial yang digagas oleh Sidney Tarrow (dalam Suharko 2006:5-7), setidaknya ada empat konsep dasar gerakan sosial yaitu:

1. Tantangan Kolektif

Keadaan untuk menghalangi kegiatan golongan lain merupakan suatu tanda dari tantangan kolektif. Dilihat dari proses perlawanan, tantangan kolektif biasa disimbolkan lewat slogan, corak pakaian dan musik. Keadaan untuk menentang secara bersama-sama merupakan bagian yang banyak dilihat dari suatu gerakan sosial. Dapat dimaknai demikian karena keadaan kurangnya sumber daya yang kokoh.

2. Tujuan Bersama

Keinginan untuk bersama dalam bergerak pastinya memiliki alasan tersendiri, apalagi bergerak dengan orang banyak. Gerakan sosial, kalau ingin mencari alasan kenapa orang ingin bersama untuk melakukan gerakan adalah untuk

melawan atau menentang pihak lain, yang dirasa merugikan banyak pihak. Hal penting untuk menjaga tujuan bersama dengan melakukan kominikasi yang berguna untuk menyamakan perbedaan persepsi, kemudian sinergi sebagai kekuatan, yaitu bagaimana mengembangkan perbedaan sebagai suatu kekuatan bersama untuk mencapai hasil yang baik.

3. Solidaritas dan Identitas Kolektif

Munculnya keinginan untuk bergerak bersama dalam gerakan sosial, merupakan suatu pandangan dari orang yang ikut berperan serta untuk mewujudkan kebutuhan bersama, yang awalnya hanya kemungkinan untuk bisa bergerak berubah menjadi pergerakan yang nyata. Menjaga Identitas kolektif menjadi hal mendasar dalam melakukan pergerakan, keadaan yang sama atau menyamakan diri dengan orang lain menjadi dasar dalam identitas kolektif yakni dengan Dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, adat, dan agama, menjadi poin pembeda yang harus dijaga.

4. Memelihara Politik Perlawanan

Gerakan bersama untuk melawan salah satu pihak berpotensi menjadi gerakan sosial. Memelihara politik perlawanan dalam kaitannya dengan gerakan sosial menjadi salah satu poin penting, tujuan yang diinginkan bersama harus dijaga agar arah gerakan tidak berubah menjadi suatu kebencian dan kemarahan yang dilepaskan tanpa memahami arah dari perlawanan. Untuk memelihara politik perlawanan dengan menggunakan sikap kritis dan waspada terhadap suguhan informasi, melakukan riset dengan sikap kritis agar tidak terlibat dalam propaganda yang akan merugikan diri atau kelompok.

Dengan demikian gerakan sosial perlu dibedakan dengan aksi-aksi kolektif. Setidaknya gerakan sosial memiliki empat properti dasar yang ditawarkan Sidney Tarrow diatas. Gerakan sosial juga dilakukan dengan penuh pertimbangan dalam pembentukannya dan orang-orang yang terlibat didalamnya.

Dalam perkembangan masyarakat, gerakan sosial dijelaskan sebagai suatu bentuk perilaku bersama yang pasti. Temuan dari beberapa ahli sosiologi memberikan tekanan bahwa gerakan sosial dijelaskan sebagai segi kesenjangan, organisasi dan kesinambungan. Umur gerakan sosial dan perkembangan peradaban manusia tentu sama tuanyan. Gerakan sosial menjadi suatu

keadaan nyata yang menarik untuk dikaji secara lebih luas, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang luas mengenai keadaan masyarakat disekitar. Perkembangan dan strategi gerakan sosial memiliki arah dan tempat tersendiri disetiap keadaan, dengan proses yang dapat di analisa dari setiap gerakan yang ada.

Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan menurut Surbakti (1992:109), memiliki pengertian sebagai organisasi yang dibentuk oleh sejumlah orang karena adanya kesamaan sikap dan tujuan. Teori ini menjelaskan bagaimana cara yang digunakan gerakan dalam mengartikulasikan kepentingannya. Dalam menjalankan tindakan kepentingannya kelompok kepentingan akan berupaya untuk mencari bentuk jalan yang efektif dan bersifat khusus sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal bagi kelompok kepentingan sebagai tujuan utama dari tuntutanannya.

menurut penemuan dari Gabriel Almond dalam (Satriawan, 2018:3) ada empat model atau tipe dari kelompok kepentingan yaitu:

1. *Kelompok Kepentingan Instutional*, merupakan sebuah kelompok yang memiliki visi dan misi dan memiliki tugas serta fungsi sebagai bagian dari kepentingan. yang biasanya merupakan bagian dari beberapa elit politik, seperti para ulama, anggota parlemen, tentara, dan berbagai elit politik lainnya.
2. *Kelompok Kepentingan Asosiasi*, merupakan kelompok yang yang terbentuk dari suatu gabungan antara kelompok dan masyarakat, yang merupakan gabungan dari kelompok tertentu, seperti perhimpunan petani dan beberapa perserikatan petani.
3. *Kelompok Kepentingan Non-Asosiasi*, merupakan kelompok yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat awam dan tidak terorganisir oleh kepentingan tertentu, kelompok yang biasanya terdiri dari kelompok suku, etnis, agama dan lain-lain.
4. *Kelompok Kepentingan Anomik*, yaitu kelompok yang terbentuk diantara unsur dalam masyarakat secara spontan, dan bersifat tak terduga dalam beberapa kejadian, misalnya kelompok demonstrasi.

Melihat teori yang ada diatas dapat dikaitkan bahwa kelompok kepentingan dan gerakan memiliki pengaruh dengan tujuan untuk mempengaruhi dari setiap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat atau yang sedang berjalan. Dalam berjalannya sistem demokrasi yang digunakan di

Indonesia, kelompok kepentingan menjadi sebuah penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Peneliti kualitatif memiliki hubungan dengan ide, persepsi, pendapat, dan kepercayaan dari orang yang diteliti yang semuanya itu tidak dapat diuji dengan angka (Sulistyo-Basuki, 2006:78).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan suatu keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. Dokumentasi merupakan catatan dari suatu peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dari dokumen seperti tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan kebijakan. Kemudian dokumen berbentuk gambar misalnya gambar hidup, foto, sketsa dan lain-lain. Adapun yang menjadi informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam aksi perlawanan dan dinas terkait, yakni Ketua RW 05, Ketua RW 06, Ketua RT 49, 52, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Teknik analisis data yang digunakan Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif sebagaimana temuan dari Miles dan Hubberman dalam (Sugiyono, 2014:246-253) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Balirejo, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Latar belakang masalah, gerakan perlawanan yang dilakukan oleh warga Dusun Balirejo terjadi akibat adanya rencana pembangunan apartemen.

Pembahasan

Maasyarakat Balirejo Sebagai Gerakan Sosial

Dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia dapat dilihat bahwa gerakan sosial sudah sangat berkembang dan terus berlanjut, akibat dari keserakahannya manusia yang sadar atau tidak sadar telah merusak alam yang berdampak kembali kepada makhluk yang ada di bumi Indonesia. Mewujudkan cita-cita keberhasilan dalam gerakan sosial merupakan suatu hal yang tidak lepas dari pengalaman kegagalan yang banyak terjadi.

Kota sebagai lingkungan hidup buatan dapat dilihat hasil dan proses interaksi antar manusia dan antara manusia dengan lingkungan. Pembangunan dapat optimal apabila didukung oleh perencanaan yang memadai. Salah satu dampak pembangunan terjadi pada sumber daya alam dan lingkungan. Akibat dampak berupa degradasi lingkungan, yang apabila dibiarkan akan merusak lingkungan kemudian menurunkan kualitas lingkungan (Jamaludin, 2017:89).

A. Tantangan Kolektif

Sebagai gerakan yang terbentuk dari latar belakang oleh keinginan untuk menjaga kerusakan lingkungan. Kampung balirejo menjadi target untuk investor melebarkan sayap sejak tahun 2015 dengan niat mendirikan bangunan apartemen dan toko. Pengembang pertama ingin melakukan pembangunan apartemen, namun karena tidak mendapat izin dari masyarakat. Pengembang kedua ingin membangun dua toko besar dan pengembang ketiga adalah yang sekarang sedang terjadi yaitu pembangunan apartemen Puri Notoprojo.

Karena permasalahan ini menyangkut dengan keberlangsungan hidup banyak orang. Kesadaran masyarakat yang sangat tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan mereka menjadi hal yang sangat membantu dalam perjuangan menolak pembangunan apartemen Puri Notoprojo selama ini.

B. Tujuan Bersama

Individu-individu yang terlibat dalam penolakan memang terdiri dari berbagai strata sosial, sehingga masyarakat memiliki kekuatan yang berlapis. Meskipun dari struktur sosial banyak yang memiliki tingkat kualitas yang baik, tetapi tetap menolak jika akan dibangun apartemen di wilayah mereka. Bahaya akan kerusakan lingkungan menjadi pendorong pribadi-pribadi masyarakat yang terlibat dalam gerakan menolak pembangunan apartemen. Masyarakat balirejo melakukan pertemuan yang kemudian dituliskan dalam berita acara hasil pertemuan warga Balirejo penolakan pembangunan apartemen, bertempat di balai RT. 52 RW. 05 Muja-Muju

Umbulharjo Yogyakarta.” Pertemuan yang diadakan pada Tanggal 17 Juni 2017 yang dihadiri warga balirejo meliputi: RT. 15, RT. 16, RT. 17, RT. 49, RT. 51 dan RT 52. Dalam wilayah RW 05 dan RT. 18, 19, 20, 53 (RW 06) dan Kampung Tangguh Bencana (KTB) Balirejo. Adapun hasil pertemuan menetapkan sebagai berikut: a. Warga Balirejo menolak rencana pembangunan apartemen dikarenakan lebih banyak mudharatnya, dan sama sekali tidak ada manfaatnya bagi warga. b. Warga Balirejo melarang keras kepada ketua RT di Wilayah RW. 05 dan ketua RW, untuk menumbuhkan tanda tangan serta cap/stempel terhadap surat-surat dan atau administrasi lainnya berkenaan dengan pengajuan izin rencana pembangunan apartemen. c. Warga Balirejo menyatakan tidak mengakui jika ada surat yang ditandatangani oleh oknum yang mengatasnamakan pengurus RT. 50 dikarenakan warga sama sekali tidak tahu menahu hal tersebut.

Tujuan dari penolakan masyarakat adalah agar proses pembangunan dapat dibatalkan dikarenakan banyaknya masalah yang akan terjadi seperti yang sudah diceritakan bahwa lokasi pembangunan sangat tidak memungkinkan. Untuk saat ini gerakan perlawanan masyarakat balirejo dapat dikatakan berhasil karena proses pembangunan telah diberhentikan, meskipun ada masyarakat yang setuju, tetapi masyarakat secara luas tetap menolak pembangunan apartemen sampai kapanpun.

C. Solidaritas Kolektif dan Identitas Kolektif

Permasalahan yang menjadi faktor masyarakat Balirejo bergerak adalah permasalahan yang terkait dengan izin pembangunan dan masalah lingkungan. diatas bahwa izin yang dimaksudkan adalah mengenai AMDAL yang belum mendapat persetujuan dari masyarakat. Inilah yang membuat masyarakat tidak setuju dan melakukan pergerakan.

Atas dasar ketimpangan yang terjadilah yang membuat masyarakat menjadi bersatu untuk menolak pembangunan apartemen di daerah Balirejo. Menurut warga balirejo apabila rencanan pembangunan ini berlanjut dan berhasil dioperasikan, maka dampak yang dirasakan masyarakat pasti sangat besar terutama masalah lingkungan seperti kemacetan yang akan sangat sulit untuk diatasi. Kolektivitas aksi masyarakat Balirejo membentuk suatu identitas kolektif berdasarkan atas kepedulian untuk menjaga lingkungan. Aksi yang dilakukan masyarakat balirejo tidak lain adalah menjaga perkampungan tempat mereka hidup agar tidak timbul masalah yang nantinya dirasakan oleh generasi selanjutnya.

D. Memelihara Politik Perlawanan

Dalam perjalanan menghadapi pembangunan Apartemen Puri Notoprojo, masyarakat balirejo mendapat berbagai tantangan. Seperti adu domba yang menjadi skenario untuk membuat antar warga berkonflik, kemudian sikap dari beberapa kelurahan dan kecamatan yang tidak seimbang dalam melihat masalah ini. Namun, dari pihak masyarakat sendiri tetap konsisten dan bersama-sama menentang adanya pembangunan apartemen.

Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Balirejo dapat dikatakan sebagai gerakan konservatif. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kornblum dalam (Sunarto, 2014) bahwa gerakan yang berupaya untuk mempertahankan nilai dan institusi masyarakat disebut sebagai gerakan konservatif. Dapat dilihat bahwa perlawanan yang dilakukan masyarakat balirejo adalah untuk mempertahankan nilai-nilai dalam masyarakat yang layak untuk hidup dengan damai dan berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, sebagai sarana untuk bertahan hidup. Berbagai isu digunakan warga Balirejo untuk menolak pembangunan. Salah satunya adalah terkait kesenjangan sosial. Nilai kearifan lokal serta guyup rukun dikhawatirkan akan mulai berkurang, bahkan bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Tentunya gerakan yang dilakukan adalah untuk menjaga dan mempertahankan nilai yang ada pada masyarakat Balirejo.

Perlawanan Warga Balirejo Terhadap Pembangunan Apartemen

Pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat tinggi dan berkaitan dengan pendidikan pariwisata. Mahasiswa luar daerah yang setiap tahunnya banyak berdatangan untuk menuntut ilmu menjadi penyumbang kepadatan penduduk. Kondisi inilah yang digunakan untuk mendirikan kos-kosan yang bertingkat, dan berkembang menjadi pembangunan apartemen dengan model yang lebih eksklusif dan menawarkan kenyamanan. Tercatat bahwa pertumbuhan pembangunan apartemen di DIY sangat pesat dan banyak kasus yang mengalami perlawanan dari masyarakat sekitaran lokasi pembangunan. Begitu pula yang terjadi di Dusun Balirejo, terdapat berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan dari aktifitas pembangunan apartemen Puri Notoprojo.

Alasan Penolakan Terhadap Apartemen

Pembangunan identik dengan pembangunan dengan skala nasional dengan fokus untuk pembangunan perekonomian. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb, dengan prinsip utama untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan (https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan).

Pergerakan masyarakat balirejo dilakukan diantaranya adalah kekhawatiran akan lingkungan yang rusak dan tidak dapat dirasakan untuk anak cucu. Berikut ada beberapa alasan penolakan masyarakat Balirejo dalam menolak pembangunan Apartemen Puri Notoprojo:

a. Berdampak kepada Akses Sosial

Menurut Fardani (2012:6) mengatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat.

Akses sosial yang dipengaruhi adalah kesenjangan sosial, Menurut Badruzaman (2009;284) dalam penemuannya mengatakan bahwa kesenjangan sosial adalah suatu pola ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat dengan perbedaan yang sangat mencolok. Atau bisa diartikan bahwa orang kaya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dari pada orang miskin. Ketakutan masyarakat balirejo akan munculnya masalah sosial adalah dengan melihat bahwa sifat individual akan sangat tinggi. Hunian yang akan ditempati adalah hunian yang memiliki desain yang seperti perhotelan, maka masyarakat sangat khawatir akan munculnya batasan antara para penghuni apartemen dan masyarakat sekitar. Masyarakat merasa akan berkurangnya rasa simpati, toleransi, keakraban jika yang menghuni adalah masyarakat yang dari kalangan eksklusif.

Kemudian akses sosial yang dipengaruhi adalah keamanan, Keamanan juga menjadi salah satu masalah sosial, sehingga menjadi alasan warga menolak pembangunan apartemen, sesuai dengan surat yang dibuat oleh warga balirejo melalui perwakilan setiap ketua RT yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 10 September 2018 yang didalamnya mengatakan bahwa warga asli Balirejo dan pengampu wilayah (RT dan RW) tidak dapat mengawasi langsung aktivitas para penghuni Apartemen yang barangkali potensial terjadi penyalahgunaan narkoba, minuman keras, free sex,

perdagangan senjata ilegal, juga pembuatan bahan-bahan narkotik. Di samping kemungkinan disusupi teroris.

b. Berdampak Kepada Akses Fisik

Menurut penemuan dari Supardi (2003:183) mengatakan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan tuhan termasuk manusia. Ketergantungan manusia terhadap lingkungan membuat manusia harus menjaga lingkungan mereka dari bahaya perbuatan manusia itu sendiri.

Akses Fisik yang dipengaruhi adalah kualitas air berkurang, Menurut Sesanti (2016: 105) meningkatnya area terbangun diwilayah perkotaan berdampak pada berkurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya air. Faktor –faktor kuat yang terkait dengan penurunan air di perkotaan yakni: (1) laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk perkotaan yang tinggi sehingga kebutuhan air bersih meningkat serta peningkatan polusi sumber air bersih; (2) penggunaan lahan di perkotaan tanpa perbandingan antara lahan terbangun dan terbuka yang mengakibatkan fungsi penyerapan air tanah terganggu; (3) erosi dan pencemaran air akibat limbah buangan dari aktifitas domestic, perindustrian maupun pertanian; (4) adanya eksploitasi penggunaan air bersih yang berlebihan oleh gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen dan hotel.

Dampak yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah masalah kapasitas air yang akan sangat terkuras oleh apartemen. Melihat bahwa rencana pembangunan akan menggunakan air dari PDAM, namun warga tetap tidak setuju dan khawatir jikalau apartemen sampai didirikan. apa yang resahkan oleh masyarakat balirejo terkait sumber air yang berkurang, dikarenakan telah banyak terjadi di berbagai tempat di Kota Yogyakarta contoh kasus yang dapat diambil sebagai pelajaran. Isu yang diangkat oleh warga sangat baik, dikarenakan sudah pernah terjadi kasus kekeringan yang melanda beberapa daerah di Yogyakarta akibat pembangunan apartemen maupun hotel.

Kemudian akses fisik yang dipengaruhi adalah polusi udara, Menurut Chambers dalam (Mukono, 2006) mengatakan pencemaran udara adalah bahan atau kimia yang bertambah ke dalam lingkungan udara normal yang dapat dideteksi oleh manusia serta dapat memberikan efek kepada manusia. Polusi udara merupakan salah satu masalah yang banyak terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Apalagi di Daerah perkotaan, hal ini

dikarenakan membludaknya kendaraan yang ada dan membuat sulitnya mendapatkan udara segar. isu terkait polusi udara yang akan membahayakan masyarakat sangat masuk akal untuk dijadikan alasan penolakan.

c. Berdampak kepada Akses Lalu Lintas

Menurut penemuan dari Etty Soesilowati (2008) mengatakan bahwa secara ekonomis, kemacetan lalu lintas akan berdampak ke biaya operasional yang tinggi, hilangnya waktu, polusi udara, tingginya angka kecelakaan, dan juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki. Apabila apartemen didirikan maka akses lalu lintas masyarakat Balirejo akan semakin sulit dan berdampak kepada kualitas udara dan stress sesama pengguna jalan yang dapat memicu sengketa di antara pengguna jalan. Hal tersebut berdasarkan fakta yang ada dilapangan, lokasi tempat rencana pembangunan memiliki badan jalan yang sempit, tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi yang padat, dan ditambah dengan aktivitas apartemen baik dari tahap pembangunan maupun tahap operasional nantinya.

Bentuk-Bentuk Perlawanan Warga Balirejo

Apartemen Puri Notoprojo yang nantinya akan dibangun di sekitaran RW 05 sampai saat ini terus diawasi dan diupayakan oleh masyarakat agar tidak terjadi. Masyarakat tidak menerima jika nantinya akan dibangun apartemen dikawasan mereka dengan alasan yang telah disampaikan diatas. Berikut adalah beberapa bentuk perlawanan yang diupayakan oleh warga balirejo khususnya RW 05 dan 06 dalam menolak pembangunan apartemen puri Notoprojo sebagai berikut:

1) Warga Balirejo RW 05 dan RW 06 Membuat Petisi Penolakan

Berpartisipasi guna melakukan sebuah perubahan merupakan hak untuk setiap orang. Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas terhadap suatu hal. Hak petisi berada pada warga Negara dan juga badan-badan pemerintahan, seperti kotapraja, kabupaten dan provinsi agar pemerintah pusat membela atau memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan daerahnya (https://id.wikipedia.org/wiki/Petisi#cite_note-ensiklopedi-1).

Dengan petisi yang dibuat dan dilengkapi dengan tanda tangan serta cap resmi dari setiap RT dan RW 05 dan 06 agar pembangunan dapat dibatalkan cukup berhasil membuat pihak pengembang kesulitan. Dikarenakan orang-orang yang bertanda tangan dalam petisi

penolakan adalah mereka yang dipercaya sebagai perwakilan suara warga Balirejo. Perkembangan era teknologi sekarang memang sangat mempengaruhi, petisi pada era perkembangan teknologi dapat lebih mudah dan lebih cepat serta efektif. Namun untuk kasus yang ada di balirejo, petisi yang dibuat tersampaikan ke semua elemen yang terkait dan terbukti menjadi salah satu pengaruh apartemen berhenti pembangunannya.

2) Warga Balirejo Membuat Baliho

Keinginan masyarakat untuk terus berjuang menolak pembangunan apartemen tidak berhenti hanya melalui petisi saja. Selain bentuk perlawanan diatas, membuat dan memasang baliho disepanjang jalan dikampung dan di depan lokasi pembangunan merupakan suatu bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat. adapun biaya pembuatan baliho adalah dari iuran para relawan atau ketua RW dan para ketua RT.

Membuat dan memasang baliho yang dilakukan warga Balirejo cukup berguna. Baliho disini digunakan oleh masyarakat untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas terkait penolakan apartemen. Baliho yang dipasang sangat menggambarkan tujuan bersama yang ingin dicapai. Dengan adanya baliho terpasang warga berharap kalau pemerintah bisa mengambil tindakan yang tegas dan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Ketika begitu banyak baliho yang terpasang, terlihat bahwa masyarakat memang serius dalam menghadapi pembangunan apartemen yang dapat membuat lingkungan balirejo tidak baik lagi.

3) Warga Balirejo RW 05 dan RW 06 Melakukan Audiensi Kepada Satpol PP kota Yogyakarta, Kelurahan, DLH, FORPI, dan WALHI

Audiensi menurut (KBBI) adalah kunjungan kehormatan. Yang biasanya dilakukan antara masyarakat dan pemerintah. Setelah membuat petisi dan baliho, ternyata bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat semakin meluas. Warga yang menolak, melakukan Audiensi dengan pihak Satpol PP terkait pembangunan apartemen. Setelah melakukan audiensi dengan pihak Satpol PP, warga mendapat berita baik dan merupakan angin segar dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP mendatangi lokasi pembangunan apartemen dan menutup proses pembangunan apartemen, dikarenakan melanggar aturan Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012 mengenai bangunan gedung.

Messkipun terdapat beberapa pihak instansi pemerintah yang masih terlalu berat sebelah ke pengembang, tetapi dalam audiensi ini keluhan dan fakta yang dibawa dan dinyatakan

oleh masyarakat balirejo berhasil diterima dan ditindak dengan tegas. Terbukti warga yang menolak apartemen bukan warga yang mudah untuk dihasut. Selama hampir empat tahun perjalanan penolakan warga masih tetap kokoh untuk kapanpun turun ke jalan jikalau ada yang dirasa ganjal dan merugikan banyak pihak.

4) Warga Kembalikan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus RT dan RW Kepada Kelurahan

Bentuk perlawanan yang terakhir dilakukan oleh Warga balirejo adalah mengembalikan SK sebagai pengurus RT dan RW ke kelurahan pada tanggal 15 Januari 2019, dikarenakan pengurus resmi yang mewakili masyarakat tidak dilibatkan dalam siding AMDAL yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Dari beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan, pengembalian SK yang dilakukan oleh setiap RT/RW yang sangat efektif. Terlihat bahwa pengembalian SK yang dilakukan akan berdampak terhadap pihak kelurahan yang nantinya akan terjadi kekosongan jabatan, sedangkan RT/RW merupakan perpanjangan tangan dari pihak kelurahan kepada masyarakat. Kalau dilihat dari teori yang digunakan, menurut Tarrow dalam (Suharko 2006:5-7) salah satu indikator untuk mengukur gerakan sosial adalah Tujuan Bersama. Keinginan untuk bersama-sama melakukan gerakan melawan pihak yang merugikan sangat jelas dalam bentuk perlawanan ini.

Dampak Perlawanan Masyarakat Balirejo

Bentuk penolakan yang dilakukan oleh warga Balirejo dalam menolak pembangunan apartemen Puri Notoprojo sangat bervariasi dan terus berkembang. Setiap kejadian yang dilakukan pasti akan memberikan dampak, baik dampak yang positif maupun memberikan dampak negatif. Perlawanan warga Balirejo RW 05 dan 06 dalam menolak pembangunan apartemen berdampak bahwa sampai pada saat ini proses pembangunan apartemen secara fisik telah berhenti dan berdampak pada masalah sosial.

Dampak perlawanan yang diakibatkan perlawanan adalah informasi satu arah, Terjadinya penolakan apartemen yang dilakukan warga Balirejo ternyata memiliki dampak dari segi informasi. Masyarakat banyak yang lebih berhati-hati dan bungkam terhadap informasi. Informasi mengenai penolakan apartemen sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas bahwa masyarakat menyerahkan semua ke RT/RW sebagai perwakilan dari mereka. Warga memilih diam karena warga memiliki alasan, yaitu warga tidak mengetahui secara detail terkait

perlawanan dan warga takut dengan kesalahan informasi yang diberikan, dikarenakan isu penolakan sangat sensitif.

Kemudian dampak yang diakibatkan oleh perlawanan adalah perubahan kondisi sosial, Terbaginya dua kubu antara setuju dan tidak setuju terkait penolakan apartemen yang terjadi di kampung Balirejo membuat kondisi sosial yang ada di masyarakat berubah. Terdapat permainan-permainan halus yang dimainkan diantara kedua pihak yang mengakibatkan kesenjangan sosial terjadi. Melihat dari penolakan yang dilakukan sampai saat ini terjadi gesekan antar warga, saling curiga, saling menghina, kemudian adanya permaian sogok-menyogok yang dilakukan tanpa diketahui oleh RT/RW sebagai pengurus, hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat.

Dalam perkembangan penolakan terhadap apartemen pergerakan masyarakat balirejo dapat dilihat sebagai kelompok kepentingan *Non-Asosiasional*, sesuai teori yang penulis gunakan, menurut Gabriel (2018) kelompok yang terbentuk apabila terdapat kepentingan yang sama untuk diperjuangkan. Melihat bahwa gerakan penolakan yang dilakukan warga balirejo adalah atas dasar kepentingan yang sama untuk menolak pembangunan Apartemen Puri Notoprojo. Kemudian sebagai kelompok yang bergerak secara sukarela, hal ini terkait dengan bagaimana masyarakat balirejo selama melakukan perlawanan, mereka menjaga persaudaraan antar individu. Bukan hanya antar individu, bahkan dengan pihak yang dilawan warga balirejo tidak melakukan aksi-aksi yang mengacaukan atau merusak tatanan yang ada.

Mobilisasi Gerakan Perlawanan Warga Balirejo

Penerapan sistem demokrasi di Indonesia, memperlihatkan bahwa Negara mampu menghimpun pendapat tiap orang untuk dikemukakan di depan umum, baik dalam bentuk tulisan, diskusi maupun aksi. kebijakan pemerintah yang terkadang tidak memihak kepada masyarakat, menimbulkan pertentangan yang melahirkan kekecewaan, ketidakpuasan serta ketidakadilan, hingga memunculkan sebuah gerakan sosial. Gerakan masyarakat yang terjadi di banyak daerah di Indonesia menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dianalisis berdasarkan sudut pandang mobilisasi sumber daya(Sari, Jurnal Politik Indonesia, No. 1, September 2017:129-130).

Menurut McCarthy dan Zald (1977: 1213) menjelaskan aspek penting dalam memobilisasi sumber daya seperti basis dukungan, strategi dan pendekatan, relasi dengan masyarakat luas. Gerakan sosial bukanlah gerakan yang tertutup, namun memiliki sebuah hubungan dan jaringan luas dengan organisasi lain. Dalam konteks kasus Balirejo, masyarakat yang tergabung

menyusun rencana untuk mendesak pemerintah membatalkan rencanan pembangunan apartemen Puri Notoprojo. Bentuk perlawanan meliputi empat tahapan. Tahapan pertama membuat memperkuat internal kelompok gerakan dengan membuat petisi penolakan, tahapan kedua mengkampanyekan penolakan dengan memasang baliho di sekitar kampung, tahap ketiga membuat laporan pengaduan kepada DLH, FORPI, Satpol PP, Kelurahan, dan Kecamatan, dan tahap keempat pengembalian SK kepengurusan RT dan RW. Dalam bentuk perlawanan masyarakat terkandung tiga aspek mobilisasi sumber daya.

Aspek pertama adalah basis dukungan berupa dana, fasilitas, dan tenaga. Masyarakat mendapatkan dana melalui iuran sukarela warga Balirejo. Tidak ada paksaan sama sekali, masyarakat dengan sukarela setiap akan melakukan aksi menggunakan uang hasil iuran untuk mendukung kebutuhan pergerakan. Seperti saat masyarakat akan memasang baliho penolakan, uang hasil iuran digunakan untuk melakukan pembuatan baliho yang dipasang di kampung Balirejo.

Aspek kedua adalah strategi dan pendekatan. Salah satu tujuan dari gerakan perlawanan agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka diperlukan pendekatan dengan stakeholder. Warga mengupayakan untuk melakukan audiensi dengan pihak DLH, FORPI, Satpol PP. warga mengumpulkan bukti-bukti aktivitas pembangunan yang menyalahi aturan oleh PT Abyudaya Tata Anugrah Mandiri, bukti tersebut digunakan sebagai alat pendukung laporan pegaduan kepada pemerintah. Selain membangun relasi dengan pemerintah, masyarakat juga melakukan pendekatan dengan pihak WALHI. Dengan mendatangi kantor WALHI dan melakukan komunikasi terkait isu lingkungan.

Aspek Ketiga yaitu relasi dengan masyarakat luas, masyarakat melakukan komunikasi dengan beberapa kelompok yang juga memiliki kesamaan tujuan yaitu menolak pembangunan apartemen. Seperti dengan warga plemburan yang juga melakukan perlawanan terkait dengan pembangunan apartemen Dhika Universe. Relasi juga dibangun dengan media massa. Peran media massa menjadi penting sebagai sarana untuk mempublikasikan berita kepada masyarakat umum, baik media cetak, media televisi maupun media online.

Warga Balirejo juga membangun jaringan komunikasi untuk memperkuat mobilisasi sumber daya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar rencanan pembangunan apartemen Puri Notoprojo tidak terlaksanan. Dengan demikian kekhawatiran masyarakat atas masalah

lingkungan yang dapat ditimbulkan dengan adanya apartemen tidak akan dirasakan. Mobilisasi yang dilakukan warga Balirejo oleh setiap perwakilan Ketua RT dan RW merupakan tindakan yang diambil oleh pihak ketua untuk menghadapi pihak lawan, yang disini adalah pihak pengembang, dan untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah untuk menyuarakan keinginan dari warga kampung Balirejo di RW 05 khususnya. Masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada masing-masing ketua RT dan RW karena masyarakat sadar akan sulit untuk menghadapi pihak pengembang secara langsung. Maka jalan untuk memberikan kepercayaan kepada pemimpin mereka merupakan suatu strategi yang sangat baik.

Dinamika Gerakan Perlawanan Warga Balirejo

Rencana untuk membangun apartemen oleh PT. Abyudaya Tata Anugrah Mandiri, sebagai pengembang yang sampai saat ini masih terus mencoba untuk bisa membangun Apartemen di kampung Balirejo. Tahun 2017 adalah mulai adanya rencana dari pihak pengembang untuk melakukan pembangunan apartemen. Berbagai macam upaya dilakukan oleh pihak pengembang untuk mendapatkan hati masyarakat Balirejo. Namun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengembang mendapat penolakan dari warga balirejo.

Pada tahun yang sama terjadi proses pembangunan yang dianggap warga sebagai salah satu kesalahan. Dikarenakan izin dari pemerintah maupun dari masyarakat sekitar belum ada yang diberikan. Bermula dari inilah perlawanan masyarakat semakin bertambah. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk bisa menghentikan proses pembangunan yang melanggar aturan. Warga mulai melakukan pertemuan untuk membahas mengenai penolakan terhadap apartemen Puri Notoprojo. Hasilnya warga membuat petisi penolakan yang dikirim kepada instansi yang dirasa dapat mendengar aspirasi mereka. Namun warga belum berhasil untuk memberhentikan pembangunan.

Langkah tegas selanjutnya dilakukan oleh warga Balirejo. dengan bermodalkan data dan fakta yang ada dilapangan, warga mendatangi pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan, FORPI, dan Satpol PP untuk melakukan audiensi. Hasil dari audiensi mendapat respon yang baik dari pihak Satpol PP. Beberapa hari setelah proses audiensi dilakukan, pihak Satpol PP dan FORPI mendatangi dan menyegel lokasi pembangunan apartemen, dikarenakan pihak pengembang melanggar Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012, yang didalamnya mengatur mengenai

bangunan gedung harus memiliki izin sebelum melakukan pembangunan. Sehingga proyek pembangunan apartemen disegel sampai saat ini.

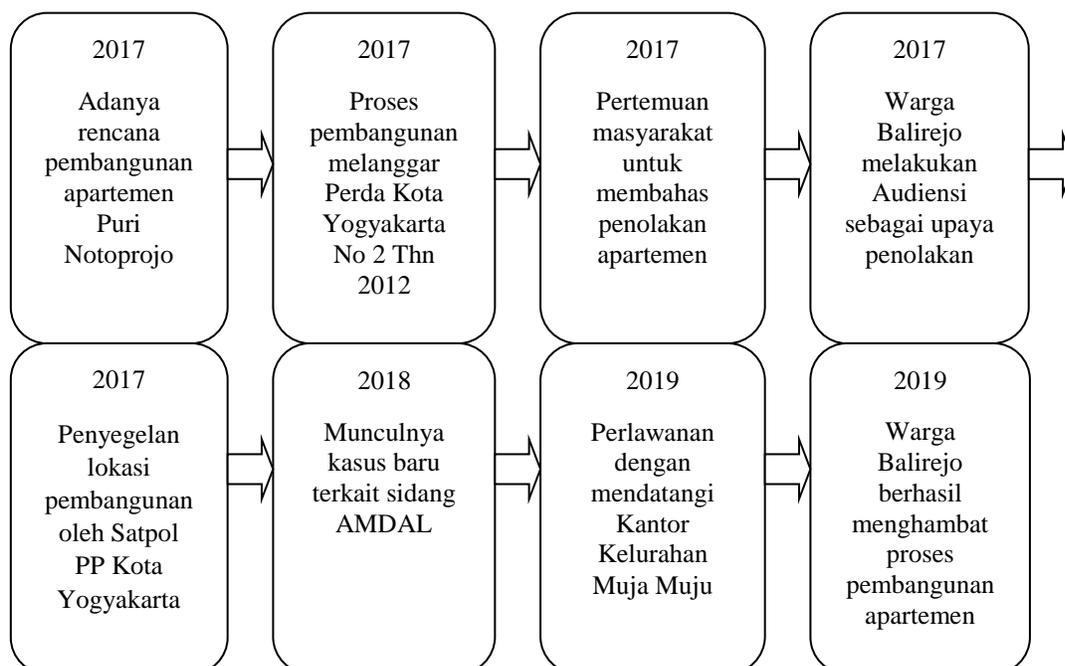
Tahun 2018, muncul masalah baru terkait dengan salah satu syarat untuk mendapatkan IMB adalah melakukan sidang terkait AMDAL. Namun dalam perjalanan mengurus AMDAL, pihak pengembang melakukan kesalahan dikarenakan beberapa warga sebagai perwakilan dari aspirasi masyarakat Balirejo di RW 05, tidak dilibatkan.

Tahun 2019, menindak lanjuti masalah yang terjadi sebelumnya, beberapa warga dan perwakilan ketua RT dan RW kembali menyuarakan tuntutan dengan mendatangi kantor Kelurahan Muja Muju, untuk mengembalikan Surat Keterangan pengangkatan kepengurusan sebagai ketua RW dan RT yang sah. Atas dasar tidak diikut sertakan dalam proses sidang AMDAL yang membuat warga mendatangi kantor Kelurahan Muja Muju.

Tahun 2019 ini, hasil dari perlawanan yang dilakukan masyarakat berhasil menghambat proses pembangunan apartemen Puri Notoprojo. Baik proses pembangunan fisik maupun proses perizinan. Namun warga Balirejo sadar bahwa perjuangan belum berakhir. Dikarenakan proses pembangunan masih dapat dilakukan apabila syarat-syarat berhasil dipenuhi oleh pihak pengembang. Masyarakat terus waspada dan bersiap jika muncul rencana-rencana baru yang terkait dengan pembangunan Apartemen Puri Notoprojo di Dusun Balirejo.

Dinamika gerkan Masyarakat Balirejo dapat diringkas Seperti bagan berikut ini:

Gambar 1. Bagan Gerakan Perlawanan Warga Balirejo



Kesimpulan

Penelitian ini menarasikan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Warga Balirejo, khususnya warga RW 05 dan 06 dalam melakukan perlawanan terhadap pembangunan apartemen di Dusun Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis memulai dengan mengidentifikasi terlebih dahulu perihal aksi yang dilakukan Warga Balirejo merupakan gerakan sosial. Kemudian, penulis melanjutkan dengan menceritakan alasan penolakan terhadap apartemen. Kemudian, bentuk-bentuk perlawanan yang digunakan oleh Masyarakat Balirejo. Kemudian, dampak dari perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Balirejo terhadap pembangunan apartemen di Dusun Balirejo.

Terdapat empat indikator yang penulis gunakan sebagai bahan dasar untuk menjelaskan aksi bersama yang dilakukan dapat dikatakan gerakan sosial. *Tantangan Kolektif* bagi masyarakat Balirejo untuk menghadapi kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesempatan untuk anak cucu dimasa akan datang; *Tujuan Bersama* masyarakat balirejo adalah membatalkan rencana pembangunan apartemen Puri Notoprojo. *Solidaritas dan Identitas Kolektif* adalah kecintaan terhadap lingkungan; terakhir yang menjadi faktor utama dari *Memelihara Politik Perlawanan* adalah gerakan yang bersifat kerelawanan dan persaudaraan yang kuat dari setiap individu yang ikut berpartisipasi. Dalam gerakan perlawanan yang dilakukan oleh warga Balirejo, Solidaritas dan Identitas Kolektif dirasa lebih dominan dalam gerakan sosial. Solidaritas warga Balirejo sangat terlihat disetiap pergerakan yang dilakukan. Selain itu jargon “Harga Mati, Warga Balirejo Tolak Apartemen” menjadi bumbu-bumbu semangat bagi masyarakat Balirejo untuk menjaga lingkungan agar dapat dinikmati bukan hanya saat ini tapi untuk masa depan.

Penolakan terhadap apartemen bukannya tanpa alasan. Warga Balirejo memiliki alasan yaitu akan berdampak kepada akses sosial, berdampak kepada akses fisik, berdampak kepada akses lalu lintas. Alasan kuat inilah yang membuat masyarakat terus berjuang sampai saat ini untuk menolak pembangunan apartemen. Beberapa bentuk perlawan masyarakat Balirejo adalah *Pertama*, warga mengadakan pertemuan dan membuat petisi penolakan yang diberikan kepada Walikota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat Jakarta, Camat Umbulharjo, dan Lurah Mujamuju. *Kedua*, warga membuat dan memasang baliho disepanjang jalan kampung tempat lokasi pembangunan apartemen sebagai tanda keseriusan dalam menolak pembangunan apartemen. *Ketiga*, warga Balirejo RW 05 dan 06 melakukan audiensi kepada Satpol PP Kota Yogyakarta, Kelurahan, FORPI, dan DLH. *Keempat*, warga mengembalikan Surat Keputusan pengurus RT dan RW kepada Kelurahan sebagai tanda kekecewaan dari para ketua dan wakil masyarakat yang tidak dilibatkan dalam sidang komisi AMDAL sebagai salah satu syarat izin untuk mendirikan bangunan.

Perlawanan yang dilakukan oleh warga Balirejo terhadap pembangunan apartemen selama ini ternyata memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif yang terjadi adalah terjadinya perubahan dalam rana sosial seperti: informasi satu arah, yaitu warga memiliki kecemasan ketika ditanya dan membicarakan mengenai penolakan apartemen. Kemudian, terjadinya Perubahan Kondisi Sosial dengan munculnya ketidakharmonisan dengan saling menuduh satu sama lain yang berakibat terjadinya pergeseran nilai-nilai hubungan sosial dan saling tidak percaya antara masyarakat dengan pemerintah kemudian masyarakat dengan masyarakat. Kemudian dampak positif yang terjadi adalah sampai saat ini proses pembangunan apartemen masih disegel dan telah berhenti proses pembangunan secara fisik.

Teori mobilisasi sumber daya oleh McCarthy dan Zald menekankan pada kondisi –kondisi yang mendukung transformasi nilai kedalam tindakan nyata. Serta terkait dengan bagaimana memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk melakukan gerakan. Dalam teori terdapat tiga aspek yang memudahkan pergerakan, yakni aspek basis dukungan, strategi dan pendekatan, serta relasi dengan masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk memobilisasi dan memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat mendukung proses pergerakan yang dilakukan oleh warga Balirejo.

Saran

Berdasarkan penelitian penulis selama dilapangan di Kampung Balirejo, saran yang dapat diberikan oleh penulis bagi warga balirejo agar tetap bersatu dengan satu suara, kemudian memanfaatkan media yang sangat berkembang untuk melakukan kampanye penolakan. Mengingat bahwa di daerah Yogyakarta sangat banyak kasus dan kejadian yang memiliki kesamaan yang kemudian dapat dijadikan acuan. Kemudian belajar dari pengalaman yang

sampai saat ini telah dilalui untuk memperkecil peluang terjadinya konflik baik itu dengan pihak pengembang, pemerintah, dan sesama warga. Kemudian saran untuk pemerintah setempat sebagai pihak yang diberikan tugas dan kewenangan, untuk terus berada diposisi yang seimbang dalam membuat dan mengambil keputusan.

Dengan demikian untuk peneliti selanjutnya, karena sampai hari ini penolakan masih terus berlanjut, penelitian ini menjadi penelitian yang terbuka untuk dapat dilakukan kajian secara lebih dalam. Penelitian lanjutan menjadi penting karena masih banyak hal menarik yang dapat diteliti dan untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari penolakan terhadap pembangunan apartemen Puri Notoprojo.

Daftar Pustaka

- Badruzaman. 2009. *Dari Teologi Menuju Aksi Membela yang Lemah, Menggempur Kesenjangan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Basuki, Sulistyو. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta:Wadatama Widya Sastra.
- Fardani, Andi. (2012). *Dampak Sosial Keberadaan PT Vale Indonesia Tbk terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur)*. Skripsi, Sekolah Sarjana, Universitas Hasanudin Makasar.
- Imam Supardi. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung.
- Jamaludin, A. N. 2017. *SOSIOLOGI PERKKOTAAN Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- McCarthy, John D. dan Mayer N. Zald. 1977. "Resource Mobilization and Social Movement: A Partial Theory," dalam *American Journal of Sociology* 6: 1212-1241.
- Mukono HJ. 2006. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan* Surabaya: Airlangga University Press.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 12 Tahun 2012 *Tentang Bangunan Gedung*.
- Sari, 2017. Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat Dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, September : 127-134.
- Satriawan, B., H. 2018. *Kelompok Kepentingan dan Gerakan Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah. Teori Politik dan Pemerintahan*. Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sesanti, A. D. (2016). *Joga Ku[dune Ora] Didol*. Yogyakarta: STPN Press

Soesilowati, Ety, 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Wilayah Pinggiran dan Kebijakan yang Ditempuhnya, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Jejak*, Volume 1 Nomor 1 halaman 9-17.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharko. 2006. Gerakan Sosial Baru di Indonesia : Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 10, No1 : Yogyakarta.

Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.

Wikipedia. 2012. “Pembangunan Berkelanjutan” Wikipedia Bahasa Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan. (akses 13 Juni 2019).

Wikipedia. 2018. “Petisi” Wikipedia Bahasa Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Petisi#cite_note-ensiklopedi-1.

Yulianingsih. 2017. Warga Desak Pemkot Yogya Tindak Tegas Pembangunan Apartemen Ilegal di <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/03/opmd47291-warga-desak-pemkot-yogya-tindak-tegas-pembangunan-apartemen-ilegal> (akses 20 Juli 2018).

